WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 /PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D, Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 64), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (10) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Perjalanan dinas oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalam Surat Tugas;

(2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPPD;

(3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menandatangani adalah Atasan Langsung, untuk:

a. Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota;

b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD;

c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota;

d. Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Walikota/ Wakil Walikota/Sekretaris Daerah;

e. Staf Ahli Walikota, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, dan Kepala Badan ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota setelah diparaf oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol, Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris Daerah;

f. Camat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah diparaf oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol dan Teknologi Informasi serta Asisten Administrasi Umum;

g. Pejabat Eselon III, IV, Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu serta Non PNS pada Sekretariat Daerah Kota ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah di paraf oleh Kepala Bagian Humas Protokol dan Teknologi Informasi, Asisten Administrasi Umum;

h. Pejabat Eselon III, IV, Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu serta Non PNS pada Sekretariat DPRD/ Inspektorat/ Dinas/Badan/ RSUD dan Kecamatan/ Kelurahan ditandatangani oleh masing-masing Kepala SKPD.

(4) Dalam hal Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berhalangan karena cuti, sakit atau tidak berada ditempat karena perjalanan dinas, maka Pejabat berwenang yang menandatangani Surat Tugas adalah Sekretaris Daerah.

(5) Kewenangan Penandatanganan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

(6) Surat Tugas menjadi dasar penerbitan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

a. pemberi tugas;

b. pelaksana tugas;

c. waktu dan lama pelaksanaan perjalanan dinas; dan

d. tempat pelaksanaan tugas.

(7) Tanggal penerbitan (penandatanganan) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada hari kerja.

(8) Waktu pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c paling lama 3 hari kecuali menghadiri undangan Workshop, Bimtek, Sosialisasi pendidikan dan pelatihan (diklat) atau sejenisnya.

(9) Pengecualian pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus mendapat persetujuan tertulis yang berupa izin/memo/ disposisi/ perintah tertulis dari Walikota (untuk Eselon II B) dan persetujuan tertulis yang berupa izin/ memo/ disposisi/ perintah tertulis dari Kepala SKPD/Atasan Langsung (untuk Eselon III):

(10) Dihapus;

(11) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (8) diubah dan ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas, terdiri dari:

a. perjalanan dinas di dalam Pulau Bangka kurang dari atau sampai dengan 8 (delapan) jam;

b. perjalanan dinas di dalam Pulau Bangka lebih dari 8 (delapan) jam; atau

c. perjalanan dinas di luar daerah.

(2) Pembayaran biaya transport di dalam Pulau Bangka kurang dari atau sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini, dengan ketentuan :

a. sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas ; atau
b. sesuai dengan jumlah penugasan pelaksanaan perjalanan dinas dalam 1 (satu) hari.

(3) Penugasan yang dilaksanakan lebih dari satu tujuan pelaksanaan perjalanan dinas dan merupakan satu kesatuan penugasan hanya diberikan sebesar 1 (satu) kali biaya transport.

(4) Pembayaran biaya transport didalam Pulau Bangka lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

(5) Biaya transport untuk perjalanan dinas diluar daerah diberikan sesuai biaya riil (*atcost*) berupa satuan biaya tiket pesawat udara berdasarkan fasilitas transport Pelaksana SPPD sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

(6) Fasilitas transport Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

(7) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:

a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

b. pungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(8) Biaya transport ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan dari Tempat Kedudukan dan Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan diberikan lumpsum berupa biaya taksi dengan besaran sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran XVII Peraturan Walikota ini.

(9) Dihapus

3. Ketentuan Pasal 28 ditambahkan 1(satu) ayat, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Khusus Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II A dan IIB dapat diberikan perjalanan dinas lanjutan.

(2) Perjalanan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas jabatan di luar daerah dari tempat tujuan sebelumnya ke tempat tujuan yang baru dan kembali ke tempat kedudukan.

(3) Perjalanan dinas ke tempat tujuan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila ada panggilan/undangan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya atau bertepatan berakhirnya pelaksanaan perjalanan dinas sebelumnya.

(4) Penandatanganan oleh pejabat atau pihak terkait ditempat tujuan perjalanan dinas yang baru cukup pada SPPD yang sebelumnya yaitu pada halaman dua baris kedua lembaran penandatangan SPPD sebagaimana dimaksud yang tercantum pada lampiran II Peraturan Walikota ini.

(5) Komponen biaya perjalanan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. uang harian sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas ketempat tujuan yang baru;

b. uang representasi sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas ketempat tujuan yang baru;

c. biaya penginapan sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas ketempat tujuan yang baru;

d. biaya sewa kendaraan dalam kota apabila menyewa kendaraan sesuai dengan jumlah hari menyewa ditempat tujuan yang baru; dan

e. biaya transport keluar daerah ketempat tujuan yang baru untuk pergi dan kepulangannya.

(6) Pembayaran komponen biaya perjalanan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d akan diperhitungkan dengan selisih jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas sebelumnya kecuali huruf e.

(7) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas lanjutan berlaku sama dengan pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) kecuali huruf a dan huruf b.

(8) Perjalanan dinas luar daerah bagi Istri/Suami Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas yang mendampingi atau turut serta menghadiri undangan besaran perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pejabat Negara yang dimaksud.

(9) Perjalanan dinas luar daerah bagi Istri/Suami Pejabat Negara bukan yang termasuk pada ayat (8) besaran perjalanan dinasnya disetarakan dengan Eselon 2B.

(10) Selain perjalanan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD dapat diberikan perjalanan dinas untuk konsultasi maksimal selama 4 (empat) hari untuk 2 (dua) atau lebih tujuan yang berbeda.

4. Ketentuan pada lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran IX, lampiran X, lampiran XII, lampiran XIV, lampiran XV dan lampiran XVI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan pada lampiran XVII merupakan penambahan lampiran pada Peraturan Walikota Ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 April 2018

Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018 NOMOR 13

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| SEKDA | |
| ASISTEN III | |
| BAKEUDA | |
| BAG HUKUM | |
| | |

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 APRIL 2018

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| Tingkatan Pelaksanaan | Pelaksana | Satuan Biaya | Representasi | Uang Makan | Transport Lokal | Uang Saku | Jumlah Biaya Perhari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tingkat A | Walikota/Ketua DPRD | OH | 1.250.000 | 750.000 | 1.000.000 | 2.700.000 | 5.700.000 |
| | Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD | OH | 1.000.000 | 600.000 | 900.000 | 2.200.000 | 4.700.000 |
| | Anggota DPRD | OH | 650.000 | 450.000 | 500.000 | 1.400.000 | 3.000.000 |
| Tingkat B | Eselon IIA | OH | 650.000 | 450.000 | 500.000 | 1.400.000 | 3.000.000 |
| | Eselon IIB | OH | 240.000 | 240.000 | 320.000 | 700.000 | 1.500.000 |
| Tingkat C | Eselon III/ PNS Golongan IV | OH | - | 200.000 | 200.000 | 700.000 | 1.100.000 |
| | Eselon IV/ PNS Gol.III/c s.d Gol.III/d | OH | - | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 800.000 |
| | Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu s.d Gol.III/b dan Non PNS | OH | - | 200.000 | 200.000 | 250.000 | 650.000 |

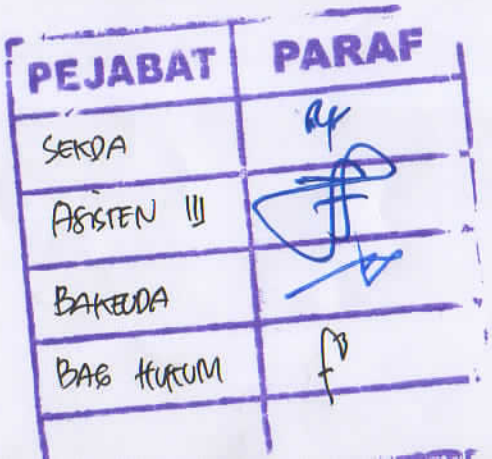


Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 APRIL 2018

A. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| Tingkatan Pelaksanaan | Pelaksana | Satuan Biaya | Satuan Biaya Tiket (PP) |
|---|---|---|---|
| Tingkat A | Walikota/Ketua DPRD | Rp | 3.000.000 |
| | Wakil Walikota/Wakil Ketua DPR | Rp | 3.000.000 |
| | Anggota DPRD | Rp | 2.750.000 |
| Tingkat B | Eselon IIA | Rp | 2.750.000 |
| | Eselon IIB | Rp | 2.139.000 |
| Tingkat C | Eselon III/ PNS Golongan IV | Rp | 2.139.000 |
| | Eselon IV/ PNS Gol.III/c s.d Gol.III/d | Rp | 2.139.000 |
| | Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu s.d Gol.III/b dan Non PNS | Rp | 2.139.000 |

B. Tujuan selain ke Jakarta

| |
|---|
| Untuk perjalanan dinas luar daerah di dalam negeri yang transit, maka biaya tiket pesawat udara menyesuaikan dengan harga tiket yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan . |

Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| SEKDA | |
| ASISTEN III | |
| BAKEUDA | |
| BAG HUKUM | |
| | |

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 APRIL 2018

# FASILITAS TRANSPORTASI
## BAGI PELAKSANA SPPD

| NO | JABATAN / ESELON | TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS | MODA TRANSPORTASI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PESAWAT UDARA | KAPAL LAUT | KERETA API / BUS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pejabat Negara/Walikota dan Wakil Walikota | A | BISNIS | VVIP | EKSEKUTIF |
| 2 | Pimpinan dan Anggota DPRD | B | EKONOMI | VIP | EKSEKUTIF |
| 3 | Pejabat Eselon IIA | B | EKONOMI | VIP | EKSEKUTIF |
| 4 | Pejabat Eselon IIB | B | EKONOMI | VIP | EKSEKUTIF |
| 5 | Eselon III/ PNS Golongan IV | C | EKONOMI | KELAS IIA | EKSEKUTIF |
| 6 | Eselon IV/ PNS Gol.III/c s.d Gol.III/d | C | EKONOMI | KELAS IIA | EKSEKUTIF |
| 7 | Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu s.d Gol.III/b dan Non PNS | C | EKONOMI | KELAS IIA | EKSEKUTIF |

Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| SEKDA | |
| ASISTEN III | |
| BAKEUDA | |
| BAG HUKUM | |
| | |

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 APRIL 2018

SATUAN BIAYA TAKSI UNTUK PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI

| NO | SATUAN | BESARAN (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| 1 | Orang/ Perjalanan | 320.000 | Lumpsum |
| | | | |

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| SEKDA | |
| ASISTEN III | |
| BAPEUDA | |
| BAG HUKUM | |
| | |

Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 APRIL 2018

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | KETERANGAN | SATUAN | TARIF HOTEL (Rp) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ATCOST | LUMPSUM (30%) |
| 1 | Walikota/ Ketua DPRD | OH | 3.500.000 | 1.050.000 |
| 2 | Wakil Walikota/ Wakil Ketua DPRD | OH | 2.500.000 | 750.000 |
| 3 | Eselon II A / Anggota DPRD | OH | 1.400.000 | 420.000 |
| 4 | Eselon IIB | OH | 1.360.000 | 408.000 |
| 5 | Eselon III/ PNS Golongan IV | OH | 992.000 | 297.600 |
| 6 | Eselon IV/ PNS Gol.III/c s.d Gol.III/d | OH | 610.000 | 183.000 |
| 7 | Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu s.d Gol.III/b dan Non PNS | OH | 610.000 | 183.000 |

Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| SEKDA | |
| ASISTEN III | |
| BAKEUDA | |
| BAG HUKUM | |
| | |

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 APRIL 2018

KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS PAMERAN
DILUAR PULAU BANGKA TAHUN ANGGARAN 2018

| NO | JABATAN/ESELON | PELAKSANAAN HARI KE : 1 S/D 3 | | | PELAKSANAAN HARI KE : 4 S/D 10 | | | PELAKSANAAN HARI KE : > 10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | | | B | | | C | | |
| | | UANG HARIAN | HOTEL/ PENGINAPAN | BIAYA TRANSPORTASI KELUAR DAERAH | UANG HARIAN | HOTEL/ PENGINAPAN | BIAYA TRANSPORTASI KELUAR DAERAH | UANG HARIAN | HOTEL/ PENGINAPAN | BIAYA TRANSPORTASI KELUAR DAERAH |
| | | OH | OM | OP | OH | OM | OP | OH | OM | OP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pejabat Negara/ Walikota/ Wakil Walikota | | ATCOST | ATCOST | - | ATCOST | ATCOST | - | ATCOST | ATCOST |
| 2 | Ketua/Wakil/ Anggota DPRD | | | | - | | | - | | |
| 3 | Eselon II | 1.200.000 | | | 480.000 | | | 200.000 | | |
| 4 | Eselon III/ PNS Golongan IV | 1.000.000 | | | 400.000 | | | 150.000 | | |
| 5 | Eselon IV/ PNS Gol.III/c s.d Gol.III/d | 800.000 | | | 320.000 | | | 125.000 | | |
| 6 | Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu s.d Gol.III/b dan Non PNS | 650.000 | | | 260.000 | | | 100.000 | | |

- uang harian secara lumpsum
- transport lokal per orang per paket (perjalanan dinas)
- Hotel/Penginapan : Minimal 2 orang per malam kecuali Pejabat Negara/Wako/ Wawako dan Eselon II ( orang/ malam)
- Opsi pergantian Biaya Hotel 30 % dari tarif ditiadakan kecuali kolom A

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| SEKDA | |
| ASISTEN III | |
| BAKEUDA | |
| BAG HUKUM | |

Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 APRIL 2018

# SATUAN BIAYA PENGINAPAN (PEMONDOKAN) PERJALANAN DINAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIDALAM PULAU BANGKA ( LEBIH DARI 10 HARI)

(dalam rupiah)

| NO | TUJUAN | SATUAN | PEJABAT NEGARA/ WAKO/ WAWAKO | PEJABAT ESELON II PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD | PEJABAT ESELON III/ PNS GOLONGAN IV | PEJABAT ESELON IV DAN PNS GOLONGAN III C S.D III D | FUNGSIONAL UMUM/ FUNGSIONAL TERTENTU SAMPAI DENGAN GOLONGAN III B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | KABUPATEN : BANGKA, BANGKA TENGAH, BANGKA SELATAN DAN BANGKA BARAT | OB | 5.000.000 | 3.700.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 |

*Biaya pemondokan sudah termasuk biaya laundry selama 1 (satu) bulan*

| EJABAT | PARAF* |
|---|---|
| EKDA | |
| SISTEN III | |
| KEUDA | |
| AG HUKUM | |
| | |

Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 APRIL 2018

KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DILUAR PULAU BANGKA TAHUN ANGGARAN 2018
( PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON KONTRIBUSI)

| NO | JABATAN/ESELON | PELAKSANAAN DIKLAT HARI KE : 1 S/D 3 | | | PELAKSANAAN DIKLAT HARI KE : 4 S/D 10 | | | PELAKSANAAN DIKLAT HARI KE : > 10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | | | B | | | C | | |
| | | UANG HARIAN | HOTEL/ PENGINAPAN | BIAYA TRANSPORTASI KELUAR DAERAH | UANG HARIAN | HOTEL/ PENGINAPAN | BIAYA TRANSPORTASI KELUAR DAERAH | UANG HARIAN | **PEMONDOKAN (ATCOST) | BIAYA TRANSPORTASI KELUAR DAERAH |
| | | OH | OM | OP | OH | OM | OP | OH | OM | OP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | PEJABAT NEGARA/ WAKO/ WAWAKO | 3.000.000 | | | 2.000.000 | | | 1.500.000 | 40.000.000 | |
| 2 | KETUA/ WAKIL/ ANGGOTA DPRD | 1.500.000 | | | 900.000 | | | 750.000 | 20.000.000 | |
| 3 | ESELON II | 1.200.000 | | | 750.000 | | | 500.000 | 15.000.000 | |
| 4 | ESELON III/PNS GOLONGAN IV | 1.000.000 | *ATCOST* | *ATCOST* | 500.000 | *ATCOST* | *ATCOST* | 200.000 | 7.500.000 | *ATCOST* |
| 5 | ESELON IV/PNS GOLONGAN III C S.D GOLONGAN III D | 800.000 | | | 400.000 | | | 160.000 | 5.000.000 | |
| 6 | Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu s.d Gol.III/b dan Non PNS | 650.000 | | | 325.000 | | | 130.000 | 4.000.000 | |

- uang harian secara lumpsum
- transport lokal per orang per paket (perjalanan dinas)
- Hotel/Penginapan : Minimal 2 orang per malam kecuali Pejabat Negara/Wako/ Wawako dan Eselon II ( orang/ malam)
- Pemondokan : Minimal 2 orang per bulan kecuali Pejabat Negara/Wako/ Wawako dan Eselon II ( orang/bulan)

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| SEKDA | |
| ASISTEN III | |
| BAKEUDA | |
| BAG HUKUM | |
| | |

Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 APRIL 2018

KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DILUAR PULAU BANGKA TAHUN ANGGARAN 2018
( PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KONTRIBUSI)

| NO | JABATAN/ESELON | PELAKSANAAN DIKLAT HARI KE : 1 S/D 3 | | | | | PELAKSANAAN DIKLAT HARI KE : 4 S/D 10 | | | | | PELAKSANAAN DIKLAT HARI KE : > 10 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HALFDAY/ FULLDAY | | | FULLBOARD | | HALFDAY/ FULLDAY | | | FULLBOARD | | HALFDAY/ FULLDAY | | | FULLBOARD | |
| | | UANG HARIAN | PENGINAPAN | BIAYA TRANSPORTASI KELUAR DAERAH | UANG HARIAN | BIAYA TRANSPORTASI KELUAR DAERAH | UANG HARIAN | PENGINAPAN | BIAYA TRANSPORTASI KELUAR DAERAH | UANG HARIAN | BIAYA TRANSPORTASI KELUAR DAERAH | UANG HARIAN | PEMONDOKAN | BIAYA TRANSPORTASI KELUAR DAERAH | UANG HARIAN | BIAYA TRANSPORTASI KELUAR DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PEJABAT NEGARA/ WAKO/ WAWAKO | 1.950.000 | ATCOST | ATCOST | 1.850.000 | ATCOST | 1.150.000 | ATCOST | ATCOST | 1.050.000 | ATCOST | 950.000 | 30.000.000 | ATCOST | 920.000 | ATCOST |
| 2 | KETUA/ WAKIL/ ANGGOTA DPRD | 1.450.000 | | | 1.350.000 | | 850.000 | | | 750.000 | | 700.000 | 15.000.000 | | 670.000 | |
| 3 | ESELON II | 1.150.000 | | | 1.050.000 | | 700.000 | | | 600.000 | | 450.000 | 15.000.000 | | 420.000 | |
| 4 | ESELON III/PNS GOLONGAN IV | 950.000 | | | 850.000 | | 450.000 | | | 350.000 | | 150.000 | 7.500.000 | | 120.000 | |
| 5 | ESELON IV/PNS GOLONGAN III C S.D GOLONGAN III D | 750.000 | | | 650.000 | | 350.000 | | | 250.000 | | 110.000 | 5.000.000 | | 80.000 | |
| 6 | FUNGSIONAL UMUM/ JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU S.D GOLONGAN IIIB DAN NON PNS | 600.000 | | | 500.000 | | 275.000 | | | 175.000 | | 80.000 | 4.000.000 | | 50.000 | |

NB:
Halfday/ Fullday : makan siang ditanggung penyelenggara
FullBoard : makan siang dan makan malam ditanggung penyelenggara

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| SEKDA | |
| ASISTEN III | |
| BAKEUDA | |
| BAG HUKUM | |
| | |

Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 APRIL 2018

SATUAN BIAYA TAKSI
KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD DAN ANGGOTA DPRD
UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | SATUAN | BESARAN (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| 1 | Orang/ Perjalanan | 600.000 | Lumpsum |
| | | | |

Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| SEKDA | |
| ASISTEN III | |
| BAKEUDA | |
| BAG HUKUM | |
| | |